

Kontestasi Politik Keekerabatan dalam Pemilihan Kepala Desa: Konteks Masyarakat Bugis

Ambo Upe^{1*} Muh. Jabal Nur², Eka Suaib²

¹Program Studi Sosiologi, Universitas Halu Oleo, Kendari

²Program Studi Ilmu Politik, Universitas Halu Oleo, Kendari

*Corresponding Author, Email: ambo.upe@uho.ac.id

Abstrak

Artikel ini bermaksud mendeskripsikan kontestasi politik kekerabatan dalam pemilihan kepala desa, khususnya dalam konteks masyarakat Bugis di Desa Tosora, dan untuk mengetahui ranah instrumental politik kekerabatan dalam pemilihan kepala Desa Tosora tahun 2020. Secara metodologis, penelitian ini didasarkan pada pendekatan kualitatif deskriptif, dimana data dikumpulkan melalui teknik wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan adanya kontestasi politik kekerabatan dalam pemilihan kepala Desa Tosora tahun 2020 antara *appang to wajo-wajo* dan *appang to latempure*. Politik kekerabatan dalam pemilihan kepala Desa Tosora memiliki pengaruh yang besar, bukan hanya sebagai pemilih, tetapi juga sebagai solidaritas instrumental dalam pemenangan calon (tim sukses) dan sebagai instrumen pengisian jabatan dalam pemerintahan desa, dimana kandidat yang terpilih lebih memprioritaskan kerabatnya (*appang*) dalam pengisian aparatur desa.

Kata Kunci: Kontestasi, Masyarakat Bugis, Pemilihan Kepala Desa, Politik Keekerabatan.

PENDAHULUAN

Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) merupakan proses rekrutmen politik di level desa yang bertujuan untuk mencari sosok pemimpin terbaik yang akan mengendalikan arah pembangunan desa. Sebagai proses politik, Pilkades memiliki kesamaan asas dengan pemilihan kepala daerah (Pilkada), yakni menjunjung tinggi beberapa prinsip dasar (langsung, umum, bebas, dan rahasia). Hanya saja Pilkades tidak dicalonkan oleh partai politik. Selain itu, para calon dalam Pilkades memiliki hubungan yang sangat erat dengan pemilihnya karena ruang lingkup konstituen yang sangat sempit. Bahkan sebagian besar calon memiliki hubungan kekerabatan dengan masyarakat yang akan dipimpinya. Dalam hal ini, faktor solidaritas kekerabatan merupakan instrumen yang sangat penting dalam kemenangan seorang calon kepala desa.

Faktor kekerabatan dalam keluarga besar sangat berpengaruh di desa-desa yang penduduknya masih didominasi penduduk asli. Rasa persaudaraan menjadi salah satu preferensi dan alasan subjektif yang cukup signifikan. Desa sebagai wilayah otonom menjadi arena terbuka dalam kontestasi politik lokal. Hal ini sejalan dengan semangat reformasi yang ditandai dengan semakin terbukanya ruang partisipasi politik (Upe, 2008). Dalam konteks masyarakat Bugis, kekerabatan (*appang*) menjadi preferensi yang sangat kuat dalam meraih suara terbanyak.

Pemilihan kepala desa (Pilkades) merupakan bentuk keterbukaan politik yang melibatkan masyarakat di level desa. Otonomi desa membawa harapan besar bagi demokratisasi di desa, namun di sisi lain menunjukkan realitas kontradiktif dalam hajatan politik desa, dimana politik kekerabatan memiliki kekuatan yang besar, sehingga “mematikan” bakal calon di luar arus kekerabatan yang mendominasi. Politik kekerabatan memberikan peluang yang sedikit kepada “kandidat pendatang” untuk berpartisipasi dalam kontestasi pemilihan kepala desa. Calon pemimpin yang memiliki latar belakang keturunan mantan kepala desa atau lahir dari hasil politik dinasti lebih banyak dukungan dibandingkan kontestan baru yang mencalonkan sebagai kepala desa.

Fenomena politik kekerabatan lazim ditemukan dalam masyarakat suku di beberapa belahan dunia (Carmack, 2019), di mana silsilah kekerabatan diterapkan untuk menentukan sistem kepemimpinan komunal. Secara sosiologis, pola tradisional ini mewariskan kekuatan politik di antara anggota keluarga yang menggambarkan diri sebagai figur tipe *godfatherism* (Thomas, et al., 2022). Pada sistem ini, mekanisme sirkulasi elite dikendalikan oleh anggota keluarga secara eksklusif dengan mengandalkan asosiasi keturunan (*appang*).

Pada Pilkades Tosora 2020 tampil 4 kandidat yang dimana salah satu diantaranya merupakan *incumbent* yaitu Asri Prasak, sedangkan ketiga calon lainnya

merupakan pendatang baru yaitu Sumarlang, Baharuddin, dan Abdul Hafid. Dari sisi latar belakang kekerabatan (*appang*), Asri Prasak menjadi simbol dari *appang towajo-wajo*, Sumarlang dari *appang to latamperu*, Abdul Hafid, dari *appang to lece-lecenge*, sedangkan Baharudin merupakan masyarakat yang lahir di Tosora tetapi bekerja di Makassar, dan saat akan diadakannya Pilkades dia memutuskan pulang dengan tujuan mencalonkan sebagai kepala desa.

Implikasi negatif dari politik kekerabatan dalam konteks demokrasi modern adalah terbukanya akses kekuasaan publik dengan hanya mengandalkan koneksi garis keturunan meskipun kurang memiliki kapasitas. Selain itu, politik kekerabatan mengancam demokrasi dalam arti mengabaikan kontestasi politik yang adil, bebas, dan terbuka karena sumber daya politik dan ekonomi didominasi oleh klan politik (*appang*) yang berkuasa. Atas dasar inilah artikel ini menarik disajikan untuk mendeskripsikan kontestasi kekerabatan dalam pemilihan kepala desa dalam konsteks masyarakat Bugis, khususnya di Desa Tosora Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan.

METODE

Pendekatan yang digunakan dalam riset ini adalah pendekatan kualitatif, dimana data dikumpulkan melalui proses tanya jawab (wawancara) dan studi dokumentasi. Menurut pandangan Bogdan dan Taylor penelitian kualitatif merupakan suatu proses yang dilakukan untuk memperoleh data yang dideskripsikan dalam bentuk kata-kata dari individu dan tingkah laku yang dapat diamati (Creswell, 2014). Adapun informan dalam riset ini yaitu, para calon kepala Desa Tosora 2020 dan masyarakat Desa Tosora sebagai pemilih.

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini meliputi data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif diperoleh dari informan sebagai objek penelitian, sedangkan data kuantitatif, yaitu data yang berdasarkan pada angka atau jumlah yang berkaitan dengan masalah penelitian (Husain, et al., 2021). Selain itu, sumber data dalam penelitian ini merujuk pada dua sumber yakni data primer dan sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sejumlah informan penelitian melalui tahap wawancara mengenai politik kekerabatan pada pemilihan kepala desa. Data sekunder yaitu data dalam bentuk catatan-catatan dari dokumen yang terdapat di kantor Desa

Tosora Mengenai jumlah penduduk dan data yang relevan dengan permasalahan penelitian.

Teknik pengumpulan data/informasi yang digunakan adalah penelitian lapangan, yaitu pengumpulan data secara langsung dengan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi (Ningi, 2022). Wawancara merupakan tatap muka dengan informan atau narasumber yang disertai tanya jawab dengan cara bebas dalam meneliti atau menggali informasi terhadap informan mengenai bagaimana politik kekerabatan dirana formal dalam hal ini pemilihan kepala desa. Sedangkan dokumentasi adalah penyempurna dari teknik wawancara yang bersifat sekunder yang berkaitan dengan bagaimana politik kekerabatan di ranah formal dalam hal ini pemilihan kepala desa. Setelah seluruh data dikumpulkan, maka selanjutnya dilakukan analisis secara kualitatif sebagaimana dimaksudkan oleh Miles dan Huberman (1994), yaitu meliputi proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

PEMBAHASAN

Politik Kekerabatan Desa Tosora

Desa Tosora adalah sebuah desa yang terletak disebelah timur Kota Sengkang Ibukota Kabupaten Wajo. Tosora merupakan salah satu desa yang berada di wilayah Kecamatan Majauleng yang mayoritas penduduknya bermata pencaharian petani. Oleh masyarakat yang berada disekitar Kabupaten Wajo mengenal daerah Tosora ini sebagai daerah berlatar belakang historis yang tak dapat dipisahkan dengan kelahiran Kabupaten Wajo (Kantor Desa Tosora, 2021).

Desa Tosora merupakan desa yang terletak antara beberapah desa di sekitarnya dimana di Desa Tosora ini memiliki tiga dusun yang dihuni oleh masyarakat desa setempat yang memiliki ikatan kekerabatan yang berbeda-beda. Ikatan kekerabatan yang dimaksud dikenal dengan istilah "*appang*". Secara geopolitik, desa Tosora terbagi dalam dusun Amessangeng, Dusun Wajo-Wajo, dan Dusun Lecce-Lecenge. Mayoritas penduduk dusun Wajo Wajo dan Lecce Lecenge masih memiliki hubungan kerabat dengan Asri Prasak. Karena itu, Asri Prasak memiliki kans yang besar dalam memenangkan pemilihan kepala desa, dimana banyak warga yang masih memiliki hubungan dekat satu sama lain. Selain adanya pembagian wilayah menjadi 3 dusun di Desa Tosora juga terdapat beberapah rumpun diantaranya yaitu "*appang to latamperu*"

dimana pada rumpun ini didominasi oleh masyarakat Dusun Amessangeng, “*appang to wajo*” yang mana masyarakatnya didominasi oleh masyarakat Dusun Wajo-Wajo, dan “*appang to lece-lecenge*” dimana masyarakatnya dominan penduduk asli Dusun Lece-Lecenge.

Solidaritas sosial atas dasar kekerabatan menjadi dasar untuk membangun modal sosial, modal politik, dan budaya yang kesemuanya instrumen penting dalam politik. Kekerabatan (*appang*) memiliki peran penting dalam ranah politik di Desa Tosora. Jika kita melihat dari rasa persatuan antara ketiga “*appang*” ini yang memiliki persatuan yang baik saat pemilihan itu ada sebuah ungkapan orang wajo yaitu *yassiwajori* yang memiliki makna sama-sama berkumpul untuk memudahkan segala urusan karena dengan bersatu semua akan bisa dilewati.

Hadirnya 3 rupun/kekerabatan ini menjadi salah satu alasan dalam menentukan pilihan. Hal ini nampak jelas di saat menjelang pemilihan beberapa masyarakat menanyakan asal usul si calon dalam artian kandidat yang maju berasal dari rumpun (*appang*) apa saja, apakah dia dari “*appang to Wajo*,” “*appang to latamperu*”, ataukah dari “*appang to lece-lecenge*”. Latar belakang kekerabatan (*appang*) menjadi modal sosial yang sangat signifikan sebagai faktor keterpilihan kandidat kepala desa. Dalam arena politik, kuasa identitas *appang* oleh elite lokal “diaktifkan” untuk memobilisasi suara pada salah satu calon yang menjadi representasi dari *appang* tertentu dalam Pilkadaes. Meski terdapat 3 rumpun (*appang*), namun dalam pemilihan Kepala Desa Tosora 2020, hanya 2 *appang* yang kontestasi secara nyata, yaitu *appang to wajo-wajo* dan *appang to latamperu*.

1. Kerabat Asri Prasak (*Appang To Wajo-Wajo*)

Pada dasarnya politik kekerabatan memiliki kesamaan dengan tipe kepemimpinan kerajaan, dimana kekuasaan dipertahankan melalui pewarisan secara turun-temurun berdasarkan hubungan pertalian darah. Dalam konteks ini, Asri Prasak yang merupakan petahana dari keluarga memiliki pengaruh yang cukup besar dalam Pilkadaes Tosora 2020. Asri Prasak merupakan anak dari mantan kepala desa sebelumnya yang dimana Asri prasak telah memimpin Desa Tosora selama 3 periode berjalan. Pada dusun Wajo-wajo merupakan mayoritas kekerabatan Asri Prasak yang dikenal dengan *appang to wajo-wajo*. Kerabat (*appang*) Asri Prasak bukan hanya sebagai pemilih,

melainkan juga mereka membentuk sebuah tim sukses dalam pemenangannya.

Kemenangan Asri Prasak pada Pilkadaes 2020 merupakan sinyal kuat masih eksisnya politik kekerabatan dalam konteks masyarakat Bugis, dimana nama keluarga besar atau kerabat (*appang*) memegang peran strategis dalam politik lokal. Hal ini sejalan dengan penjelasan Querubin (2011) bahwa dinasti politik terjadi karena adanya upaya yang dilakukan individu dalam mempertahankan atau menciptakan kembali kekuasaan yang dulu sampai sekarang, dimana terdapat segelintir kelompok keluarga yang memainkan kekuasaan politik.

2. Kerabat Sumarlang (*Appang To Latamperu*)

Sumarlang adalah masyarakat yang berasal dari dusun Amessangeng dari *appang to latamperu*. Umumnya penduduk asli Dusun Amessangeng adalah kerabatnya. Pada pemilihan kepala desa Tosora 2020, Sumarlang disarankan untuk maju sebagai calon oleh masyarakat setempat karena adanya ketidakpuasan masyarakat Dusun Amessangeng dengan kinerja dan pelayanan kepala desa sebelumnya yang lebih mengutamakan keluarganya serta kurangnya pembangunan di Dusun Amessangeng.

Lain halnya dengan Asri Prasak yang memiliki latar belakang politik, sedangkan Sumarlang tidak memiliki latar belakang politik kekerabatan. Sumarlang hanyalah masyarakat biasa yang didorong untuk mencanlonkan diri sebagai kepala Desa Tosora untuk pertama kalinya pada tahun 2020 dengan memanfaatkan ikatan marga dan kekerabatan. Kerabat (*appang*) dari Sumarlang belum memiliki *track record* yang matang dalam momentum politik lokal. Secara historis, belum ditemukan penguasa (kepala desa) yang berasal dari *appang to latamperu*. Solidaritas kerabat Sumarlang dalam berbagai acara kekeluargaan seperti pernikahan tampak tidak signifikan berpengaruh dalam meraih kemenangan dalam kontestasi pemilihan kepala desa.

Penguatan kerabat (*appang*) dalam kontestasi Pilkadaes Tosora 2020 semakin menegaskan kuatnya politik kekerabatan dalam konteks lokal, termasuk pada masyarakat Bugis. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Purwaningsi (2011) dalam konteks politik kekerabatan di Sulawesi Selatan yang menunjukkan bahwa nama besar keluarga memiliki pengaruh yang signifikan dalam mempengaruhi dukungan publik. Hal ini berimplikasi pada kualitas kepemimpinan tidak lagi menjadi prioritas yang pada gilirannya akan melemah-

kan demokrasi. Temuan peneliti ini semakin menambah khasanah konsep politik kekerabatan dalam konteks global sebagaimana penelitian Dal Bo, et al. (2006) dan Casey (2009) keduanya meneliti di Amerika Serikat, demikian juga penelitian Querubin (2011) dan Mendoza, et al. (2012) di Philipina, serta penelitian Asako, et al. (2015) di Jepang yang kesemuanya mengkaji tentang politik kekerabatan.

Berdasarkan data lapangan dan berbagai hasil penelitian terdahulu menegaskan bahwa dalam politik kekerabatan atau yang juga dikenal dengan istilah politik dinasti senantiasa mempertahankan kekuasaan atas dasar garis keturunan. Momentuk suksesi dan pengisian jabatan politik selalu diwarnai oleh orang-orang dari kerabat secara turun-temurun. Jabatan politik berputar dalam lingkaran keluarga. Politik kekerabatan memanfaatkan pemimpin sebelumnya dalam memperoleh dukungan, terlebih lagi jika pemimpin sebelumnya memiliki citra yang baik di mata masyarakat. Politik kekerabatan yang tidak dilandasi oleh kualitas kepemimpinan akan sangat menciderai kualitas demokrasi di Indonesia.

Kekerabatan Sebagai Solidaritas Instrumental

Masyarakat Desa Tosora marga lebih dikenal dengan istilah *appang* yang dimana terdapat tiga kelompok besar marga di Desa Tosora, yaitu *Appang To Wajo-Wajo*, *Appang To Latamperu*, dan *Appang To Lece-lece*. Pada awalnya marga tersebut merupakan nama wilayah di desa Tosora, tetapi karena perkembangan penduduk (keturunan), maka nama daerah tersebut dijadikan sebagai suatu ikatan tali keturunan yang diwariskan oleh nenek moyang dari generasi sebelumnya. Perkembangan garis keturunan (*appang*) tersebut pada gilirannya “dimanfaatkan” dalam konteks politik di desa. *Appang to wajo-wajo* memiliki persatuan yang kuat sehingga setiap pemilihan calon yang berasal dari marga itu memiliki peluang yang besar untuk menang. Politik kekerabatan dalam Pilkades Tosora 2020 merupakan instrumen yang memiliki peran penting, yaitu sebagai instrumen pemenangan calon dan sebagai instrumen pengisian jabatan pemerintahan.

1. Instrumen Pemenangan Calon

Kerabat tidak sekadar simbol sosiologis sebagai ikatan pertalian darah, melainkan dapat “diaktifkan” dalam peran-peran politik. Pilkades Tosora 2020 merupakan bukti nyata bagaimana bekerjanya unsur kekerabatan dalam momentum politik lokal di desa. Kontestasi dalam Pilkades Tosora 2020 bukan hanya

wujud rekrutmen politik dalam konteks demokrasi lokal, tetapi juga kontestasi politik kekerabatan antara Asri Parasak (*appang to wajo-wajo*) dengan Sumarlang (*appang to latamperu*). Betapa tidak, Asri Prasak sebagai petahan dengan *track record* politik yang kuat berhasil memenangkan Pilkades, dibandingkan kekalahan Sumarlang yang hanya mengandalkan dukungan sosial. Ikatan kekeluargaan yang terbangun dalam spirit *appang* dimainkan sebagai instrumen dalam pemenangan, baik mereka sebagai pemilih maupun sebagai tim sukses.

2. Instrumen Pengisian Jabatan Pemerintahan

Menguatnya kekerabatan (*appang*) dalam momentum kontestasi politik berimplikasi secara politik dalam penentuan jabatan pemerintahan. Hal ini bukan hanya sebagai bentuk “balas budi” dari kerja keras kaum kerabat, melainkan juga sebagai upaya nyata dalam mempertahankan kekuasaan berdasarkan garis keturunan, meski seringkali mengabaikan aspek kapasitas individu. Hadirnya kekuatan kekerabatan sebagai solidaritas instrumental dalam kontestasi Pilkades Tosora 2020 semakin menguatkan praktik-praktik politik familisme.

Jejaring kekerabatan marga (familisme) mempengaruhi penguasa dan elite politik lokal dalam menjalankan kekuasaan di dalam suatu wilayah. Praktik familisme berbasis marga bekerja di ranah formal dan dapat ditemukan di lembaga-lembaga demokrasi maupun lembaga Negara (birokrasi). Hal ini dipengaruhi oleh konteks politik yang berbasis feodalisme, tribalisme, dan populisme (Djati, 2013). Dengan menguatnya praktik politik marga dalam politik dan pemerintahan lokal memunculkan tantangan dalam proses demokrasi lokal dalam suatu daerah karena familisme atau praktek politik berbasis marga dapat melahirkan dominasi, hegemoni, dan ketidaksetaraan.

KESIMPULAN

Terdapat dua hal penting yang dapat ditarik sebagai kesimpulan dalam artikel ini. Pertama, politik kekerabatan di dalam pemilihan kepala desa khususnya dalam konteks masyarakat Bugis masih berjalan hingga saat ini. Pilkades Tosora 2020 adalah salah satu potret nyata, dimana ikatan kekerabatan atau keluarga mempunyai pengaruh yang besar terhadap keterpilihan Asri Prasak dari *appang to wajo-wajo*. Kedua, kekuatan politik kekerabatan tidak hanya memainkan peran penting sebagai instrumen pemenangan calon dari kerabatnya, tetapi juga berimplikasi secara politik dalam

penentuan posisi jabatan dalam pemerintahan. Kepala desa terpilih lebih memprioritaskan kerabatnya sebelum merekrut aparatur desa yang berasal dari luar kerabatnya. Pola pengisian jabatan seperti ini akan mengganggu prinsip-prinsip demokrasi lokal desa.

REFERENSI

- Asako, Y., Iida, T., Matsubayashi, T., & Ueda, M. (2015). Dynastic Politicians: Theory and Evidence from Japan. *Japanese Journal of Political Science*, 16(1), 5-32.
- Carmack, R. M. (2019). *Power in Cross-Cultural Perspective: Tribal Politics. In Social Power and Political Influence*. Routledge.
- Casey, K.L. (2009). "Family Matters: The Prevalence and Effects of Political Families in National Politics". Ph.D Dissertation University of Missouri.
- Creswell, J.W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. London: Sage.
- Dal Bo, E., Dal Bo, P., Snyder, J. (2006). *Political Dynasties*. Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=909251>.
- Djati, W. R. (2013). Revivalisme Kekuatan Familisme dalam Demokrasi: Dinasti Politik di Aras Lokal. *Jurnal Sosiologi Masyarakat*, 18 (Juli), No. 2: 203-231.
- Husain, M. N., Nasir, M., & Suryani B.B. (2021). Bureaucracy Involvement in Local Election In Konawe Selatan District. *Indonesian Journal of Innovation and Applied Sciences (IJIAS)*, 1(1), 52-58.
- Mendoza, R. U., Beja, E.L., Venida, V.S., Yap, D.B. (2012). Inequality in Democracy: Insights from an Empirical Analysis of Political Dynasties in the 15 Philippine Congress. *Philippine Political Science Journal*, 33(2): 132-145.
- Miles, M.B & Huberman, A.M. (1994). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*. London: Sage.
- Ningi, A. I. (2022). Data Presentation in Qualitative Research: The Outcomes of the Pattern of Ideas with the Raw Data. *International Journal of Qualitative Research*, 1(3), 196-200.
- Purwaningsi, T. (2015). Politik Kekerabatan dan Kualitas Kandidat di Sulawesi Selatan. *Jurnal Politik*. 1(1): 97-123.
- Querubin, P. (2011). Political Reform and Elite Persistence: Term Limits and Political Dynasties in the Philippines. *APSA Annual Meeting Paper*.
- Thomas, Y. A., Patrick, O. U., Aikoye B. J., & Esomchi O. S. (2022). The Implication of Godfatherism in the Appointments of Heads of LGC and Democratic Consolidation in Kogi State. *International Journal of Qualitative Research*, 1(3), 156-163.
- Upe, A. (2008). *Sosiologi Politik Kontemporer*. Jakarta: Prestasi Pustaka.